



PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BANJIR DI KOTA CIMAHI

Aliyyah Ratu Syahrani¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Noer Apptika Fujilestari³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam penanggulangan pasca banjir di Kelurahan Melong. Analisis menggunakan teori Rasyid (dalam Labolo, 2017) yang membagi peran pemerintah menjadi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian kualitatif ditempuh melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan pihak BPBD, perangkat kelurahan, dan masyarakat terdampak banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi regulator, BPBD berperan menyusun kebijakan, SOP, serta rekomendasi hasil kaji cepat, namun penerapan prinsip Build Back Better and Safer masih terkendala koordinasi lintas wilayah. Pada dimensi dinamisator, BPBD mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui gotong royong, evakuasi korban, dan sosialisasi kebencanaan, meskipun edukasi rutin perlu diperkuat kembali. Pada dimensi fasilitator, BPBD menyediakan sarana prasarana, distribusi logistik, evakuasi, dan bantuan perbaikan rumah, meski rencana teknis jangka panjang masih menghadapi kendala komitmen antar daerah. Secara keseluruhan, peran BPBD tergolong cukup optimal, terutama pada aspek dinamisator dan fasilitator yang langsung berdampak pada pemulihan masyarakat, sementara dimensi regulator memerlukan peningkatan koordinasi serta percepatan kebijakan teknis agar pemulihan lebih berkelanjutan.

Kata kunci : BPBD, banjir, pasca bencana, teori Rasyid, peran pemerintah

Abstract

This study analyzes the role of the Regional Agency of Disaster Management of Cimahi City in post-flood management in Melong Subdistrict. The analysis applies Rasyid's theory (in Labolo, 2017), which divides the government's role into three dimensions: regulator, dynamisator, and facilitator. A qualitative method was employed through literature review, observation, and interviews with BPBD officials, local government staff, and affected communities. The findings show that in the regulator dimension, BPBD formulates policies, SOPs, and rapid assessment recommendations; however, the implementation of the Build Back Better and Safer principle remains constrained by cross-regional coordination. In the dynamisator dimension, BPBD successfully mobilized community participation through mutual cooperation, victim evacuation, and disaster socialization, though routine education requires reinforcement. In the

facilitator dimension, BPBD provided infrastructure, logistics distribution, evacuation, and housing repair assistance, yet long-term technical solutions still face interregional commitment challenges. Overall, BPBD's role is considered quite optimal, especially as dynamisator and facilitator with direct impacts on recovery, while the regulator role requires stronger coordination and accelerated technical policies to ensure sustainable post-disaster recovery.

Keywords: *BPBD, flood, post-disaster, Rasyid's theory, governmental roles*

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi, banyak aliran sungai, serta kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadikan banjir sebagai ancaman yang hampir setiap tahun berulang. Selain dipengaruhi oleh faktor alam, buruknya sistem drainase, tingginya sedimentasi, serta kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan semakin memperburuk risiko banjir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 1.255 kasus banjir, sementara pada tahun 2024 tercatat 1.109 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi salah satu bencana paling dominan di Indonesia dengan dampak yang luas terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, hingga psikologis masyarakat.

Salah satu provinsi yang paling sering terdampak banjir adalah Jawa Barat. Tingginya curah hujan, kondisi topografi yang bervariasi, serta banyaknya aliran sungai menjadikan provinsi ini menempati peringkat kedua daerah dengan kejadian banjir terbanyak di Indonesia. Kota Cimahi sebagai bagian dari Jawa Barat turut menghadapi permasalahan serius akibat bencana banjir. Kecamatan Cimahi Selatan, khususnya Kelurahan Melong, menjadi salah satu wilayah yang rawan terdampak setiap kali musim hujan tiba. Karakteristik wilayah yang berada di dataran rendah, berdekatan dengan aliran sungai sempit, serta tingginya aktivitas industri dan kepadatan penduduk membuat Melong semakin rentan terhadap banjir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, jumlah kejadian banjir di Kecamatan Cimahi Selatan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20 kali, di mana Kelurahan Melong mengalami lima kali banjir. Namun, pada tahun 2023 jumlah kejadian banjir di kecamatan tersebut

menurun menjadi 15 kali, dan di Kelurahan Melong hanya terjadi dua kali banjir. Penurunan ini menunjukkan adanya indikasi keberhasilan upaya penanggulangan yang dilakukan, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah banjir yang ada. Di balik capaian tersebut, terdapat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi yang aktif melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari normalisasi saluran air, penyediaan bantuan pascabencana, hingga sosialisasi pencegahan banjir kepada masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan penanggulangan pascabencana di Kelurahan Melong belum sepenuhnya berjalan optimal. BPBD Kota Cimahi masih menghadapi masalah, yaitu dalam upaya struktural seperti pelebaran sungai dan pembangunan sodetan membutuhkan koordinasi lintas daerah antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung, yang sering terkendala birokrasi dan anggaran. Kondisi ini menyebabkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lambat, sementara risiko terjadinya banjir susulan tetap tinggi.

Peran BPBD dalam fase pascabencana sebenarnya sangat krusial. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus berlandaskan prinsip *build back better and safer* agar wilayah terdampak menjadi lebih aman dan tangguh terhadap bencana di masa mendatang. Dalam konteks Kelurahan Melong, BPBD Kota Cimahi memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemulihan infrastruktur, penataan lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Meski beberapa program telah berjalan, seperti pendistribusian bantuan dan perbaikan saluran air, implementasinya belum menyentuh akar permasalahan seperti pelanggaran garis sempadan sungai, kepadatan permukiman, serta kurangnya pengawasan pembangunan di daerah rawan banjir.

Fenomena penurunan jumlah kejadian banjir di Kelurahan Melong menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh, mengingat secara geografis wilayah ini bersebelahan dengan Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang juga merupakan daerah rawan banjir. Penurunan dari lima kejadian pada tahun 2022 menjadi dua kejadian pada tahun 2023 menunjukkan adanya

kontribusi nyata BPBD meskipun masih banyak keterbatasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana BPBD Kota Cimahi mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam penanggulangan pascabencana, serta bagaimana strategi yang ditempuh untuk menghadapi hambatan sumber daya, koordinasi lintas daerah, dan keterbatasan kebijakan yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam penanggulangan pasca banjir di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai sejauh mana BPBD mampu berkontribusi dalam mengurangi risiko bencana berulang di masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam penanggulangan pasca bencana banjir di RW 02, Kelurahan Melong. Penelitian ini melibatkan berbagai informan yang dipilih secara purposif, meliputi kepala BPBD, kepala seksi sarana dan prasarana Kelurahan Melong, ketua RW, ketua RT, serta masyarakat setempat, guna mendapatkan data yang komprehensif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu kebijakan dan regulasi (regulator), partisipasi dan pendampingan (dinamisator), serta fasilitas, bantuan, dan pemberdayaan (fasilitator), yang diharapkan dapat menggambarkan peran BPBD secara utuh dalam proses pemulihan pasca banjir di Kota Cimahi. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan kaya makna, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Kota Cimahi, terutama saat musim hujan dengan curah yang tinggi. Penyebab utama banjir ini antara lain sistem drainase yang kurang optimal, perubahan tata guna lahan yang mempercepat aliran air permukaan, serta kondisi geografis wilayah yang rentan terhadap genangan air. Akibat banjir, masyarakat mengalami berbagai dampak, mulai dari kerusakan fisik seperti terendahnya permukiman dan rusaknya infrastruktur jalan, hingga gangguan pada aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Dalam menghadapi dampak tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berperan penting dalam penanggulangan pasca banjir. BPBD melakukan berbagai upaya koordinasi dan mitigasi untuk mempercepat pemulihan kondisi seperti evakuasi korban, penyediaan bantuan logistik, serta perbaikan fasilitas umum yang terdampak. Peran BPBD ini sangat krusial dalam membantu masyarakat kembali beraktivitas normal dan meminimalisir kerugian yang lebih besar akibat banjir.

Untuk dapat mengetahui bagaimana peran badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kota Cimahi, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi, dan wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan berdasarkan teori yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu dengan beberapa dimensi dan indikator dari teori peran pemerintah yang di kemukakan oleh Rasyid (dalam Labolo, 2017), yakni:

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah Kota Cimahi berperan penting sebagai regulator dalam penanggulangan bencana banjir tidak hanya pada tahap pencegahan dan tanggap darurat, tetapi juga pada fase pasca bencana. Setelah banjir, pemerintah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan, mencakup perbaikan infrastruktur seperti jalan dan sistem drainase, penyediaan bantuan sosial, serta dukungan psikososial. Selain itu, pemerintah mengatur tata ruang dan zonasi untuk rekonstruksi bangunan

dan penataan kembali permukiman agar tidak meningkatkan risiko banjir di masa depan dengan mengoptimalkan area resapan melalui ruang terbuka dan badan air. Regulasi ini memastikan proses pemulihan yang tepat guna dan tahan bencana, mendukung masyarakat bangkit secara menyeluruh.

a) Peraturan yang mengatur tentang rekonstruksi dan rehabilitasi

Peraturan yang mengatur rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana menekankan pentingnya adanya rencana kontinjensi sebelum bencana terjadi, perencanaan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, serta penerapan prinsip Build Back Better and Safer dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Melong, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya mitigasi seperti pengerukan sungai, namun kapasitas sungai di hilir yang masuk wilayah Kabupaten Bandung masih terbatas sehingga memerlukan koordinasi lintas wilayah untuk solusi jangka panjang yang lebih aman dan berkelanjutan.

Di tingkat masyarakat, pemulihan pasca bencana seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun lebih baik, namun hal ini belum terasa secara nyata, misalnya pada pelebaran sungai yang tertunda akibat masalah pembebasan lahan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang “Build Back Better and Safer” belum diimplementasikan secara optimal. Kondisi wilayah yang cekung dengan aliran air dari berbagai daerah serta kapasitas saluran sungai yang kecil menyebabkan banjir di RW 2 terus berulang setiap tahun.

b) Menetapkan prosedur operasional standar (SOP) penanganan pasca banjir

Pemulihan pascabanjir di RW 2 Kelurahan Melong menekankan pentingnya prosedur operasional standar (SOP) yang mencakup kaji cepat kondisi lapangan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, hingga pemulihan sarana vital. BPBD Kota Cimahi berperan dalam memberikan rekomendasi hasil kaji cepat kepada instansi terkait, khususnya DPKP dan DPUPR, untuk menindaklanjuti upaya revitalisasi dan pembangunan sarana

penunjang seperti embung. Namun, koordinasi lintas wilayah, seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, masih menjadi tantangan karena perlu kesepakatan formal (MOU) terkait solusi pembuangan dan pengaliran air yang efektif.

Sementara itu, distribusi bantuan pascabanjir di RW 2 dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, diawali dengan pengajuan dan asesmen lapangan untuk mendata jumlah warga, rumah terdampak, serta kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis dan jumlah bantuan sehingga penyaluran lebih tepat sasaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun SOP penanganan pascabanjir belum berjalan optimal akibat keterbatasan koordinasi antarinstansi, distribusi bantuan sudah berlangsung dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah dalam penanggulangan pasca bencana tidak hanya sebatas sebagai pembuat kebijakan dan pengatur regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai dinamisator atau penggerak yang mendorong terjadinya perubahan sosial, mengaktifkan partisipasi masyarakat, serta mengarahkan proses pemulihan menuju peningkatan ketangguhan kolektif. Pemerintah diharapkan hadir bukan hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran, kapasitas, dan kemandirian warga dalam menghadapi bencana, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Peran ini menjadi sangat penting terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana seperti RW 02 Kelurahan Melong, di mana fungsi dinamisator mencakup indikator yang menekankan pada penguatan partisipasi serta kemandirian masyarakat.

a) Menggerakkan partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pasca bencana banjir di wilayah penelitian tergolong aktif dan kolaboratif. Hal ini terlihat dari keterlibatan warga bersama Ketua RW, RT, dan staf kelurahan dalam

berbagai kegiatan seperti membantu korban jiwa, mengurus ambulans, menjaga rumah korban, serta melakukan koordinasi saat terjadi hujan deras. Warga juga menunjukkan inisiatif tinggi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan pasca banjir tanpa harus menunggu arahan, meskipun ada perbedaan dalam penanganan area rumah pribadi dan jalan umum. Solidaritas antarwarga tetap terjaga, termasuk dalam membantu tetangga yang sakit atau tidak mampu berpartisipasi langsung.

Selain partisipasi masyarakat, peran BPBD sangat penting dalam mempercepat pemulihan kondisi pasca banjir. Upaya yang dilakukan antara lain penyedotan air agar genangan cepat surut, pemberian logistik, evakuasi warga terdampak, serta sosialisasi langkah-langkah tanggap darurat. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar aktivitas sehari-hari, mobilitas, dan perekonomian warga segera kembali normal. Kolaborasi yang erat antara masyarakat, aparat kelurahan, dan BPBD menunjukkan bahwa proses rehabilitasi pasca bencana di wilayah tersebut berlangsung efektif. Partisipasi aktif ini tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga membangun kesadaran serta kapasitas lokal untuk menghadapi risiko bencana di masa depan.

- b) Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat terdampak banjir terkait langkah pemulihan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat terdampak banjir menjadi faktor penting dalam pemulihan pascabencana. Upaya edukasi, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat melalui kegiatan sederhana seperti kerja bakti membersihkan lingkungan terbukti efektif meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab kolektif. Dukungan pemerintah daerah, khususnya BPBD, dalam memberikan informasi, bantuan logistik, dan arahan terkait langkah antisipasi saat banjir juga berperan besar dalam mempercepat proses rehabilitasi sekaligus menjaga ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, proses pemulihan tidak

hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga memperkuat kemandirian sosial untuk menghadapi potensi banjir di masa depan.

Namun demikian, peneliti juga mencatat bahwa frekuensi sosialisasi kepada masyarakat kini cenderung menurun sehingga berpotensi melemahkan kesiapsiagaan warga terhadap bahaya banjir. Kondisi ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program edukasi dan pendampingan agar masyarakat tetap sadar, siaga, dan tangguh menghadapi bencana. Dengan mempertahankan integrasi antara pembinaan, partisipasi aktif masyarakat, serta peran pemerintah, ketahanan komunitas terhadap banjir dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Dalam penanggulangan pasca bencana, pemerintah berperan penting sebagai fasilitator yang tidak hanya menyediakan sarana, prasarana, dan bantuan fisik, tetapi juga membangun ekosistem pemulihan yang berkelanjutan melalui sinergi antar aktor, pemanfaatan potensi lokal, serta pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah menjembatani kebutuhan warga dengan sumber daya yang tersedia, membuka akses layanan publik, bantuan, dan pendampingan berbasis pemberdayaan sehingga tercipta ruang kondusif bagi masyarakat untuk bangkit secara partisipatif. Jika peran ini dijalankan optimal, proses pemulihan akan berkembang menjadi gerakan kolektif yang menekankan kemandirian, gotong royong, dan keberlanjutan jangka panjang.

- a) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pemulihan pasca banjir

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemulihan pasca banjir menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan wawancara dengan pihak BPBD Kota Cimahi, upaya yang dilakukan meliputi penyedotan air genangan, penyediaan bantuan logistik, evakuasi warga terdampak, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Tindakan cepat dalam membuang air genangan dinilai penting agar tidak menimbulkan banjir susulan

maupun kerusakan yang lebih parah. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat, melancarkan lalu lintas, dan memulihkan perekonomian seperti sebelum bencana.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana telah berjalan efektif dan responsif. Sistem penyedotan air dilaksanakan segera tanpa menunggu proses asesmen yang panjang, sehingga mempercepat pemulihan. Proses distribusi logistik, evakuasi korban, dan sosialisasi juga terkoordinasi dengan baik, melibatkan BPBD dan kelurahan secara aktif. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Cimahi telah berperan optimal sebagai fasilitator pemulihan pasca banjir dengan menunjukkan komitmen untuk mengembalikan kondisi normal secara cepat serta meminimalisir dampak lanjutan dari bencana.

b) Memfasilitasi bantuan kepada masyarakat terdampak

Distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di RW 2 Kota Cimahi dilakukan melalui mekanisme resmi BPBD yang menyalurkan bantuan lewat kelurahan. Bentuk bantuan meliputi sembako, air mineral, selimut, obat-obatan, serta popok bayi, dan meski proses pengambilan bantuan dilakukan di kelurahan, hal ini tetap dinilai membantu masyarakat. Selain itu, bantuan untuk rumah yang rusak juga diberikan berupa alat bangunan dan biaya tukang. Kendati demikian, masih terdapat kendala, seperti keterbatasan air bersih yang memperlambat proses pembersihan pasca banjir. Secara umum, upaya BPBD dalam memfasilitasi bantuan cukup optimal meskipun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Selain distribusi bantuan, BPBD juga berperan sebagai koordinator lintas dinas seperti DPUPR dan DPKP, serta menjalin koordinasi antar pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Hal ini penting mengingat aliran sungai di Cimahi bermuara ke Kabupaten Bandung sehingga penanganan banjir membutuhkan solusi tata ruang bersama, seperti pembangunan sodetan atau saluran air baru yang dapat menampung debit air lebih

besar. Namun, realisasi rencana tersebut masih terhambat karena belum adanya komitmen bersama dari kepala daerah empat wilayah terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski peran BPBD sudah cukup signifikan dalam distribusi bantuan dan koordinasi, tantangan terbesar masih terletak pada penyelesaian kebijakan bersama untuk penanggulangan banjir jangka panjang.

KESIMPULAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kota Cimahi sangat vital, khususnya dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah kota berfungsi sebagai regulator yang menetapkan regulasi dan prosedur sesuai prinsip Build Back Better and Safer, meskipun masih ditemukan kendala seperti koordinasi antar wilayah dan pembebasan lahan untuk mitigasi jangka panjang. Selain itu, sebagai dinamisator, pemerintah efektif menggerakkan partisipasi aktif masyarakat melalui koordinasi dengan aparat setempat dan BPBD, yang memperkuat kesadaran, kapasitas, dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko dan mempercepat proses pemulihan. Peran ini berkontribusi signifikan dalam membangun ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan setelah bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, A. (2021). *Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Atasi Banjir Tahunan di Melong Cimahi*. INews Jabar. <https://jabar.inews.id/berita/pembebasan-lahan-masih-jadi-kendala-atasi-banjir-tahunan-di-melong-cimahi>
- Kecamatan Cimahi Selatan Dalam Angka 2023*. (2023). Badan Pusat Statistik Kota Cimahi.
- Kecamatan Cimahi Selatan Dalam Angka 2024*. (2024). Badan Pusat Statistik Kota Cimahi.
- Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Pers.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- Rizana, W., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Peran Bpbd Dalam Upaya

Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir
Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan
Pendidikan)*, 5(3), 193–199. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2112>